panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Sinergi untuk Indonesia Maju

PROGRES PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT EVALUASI SPBE TAHUN 2024

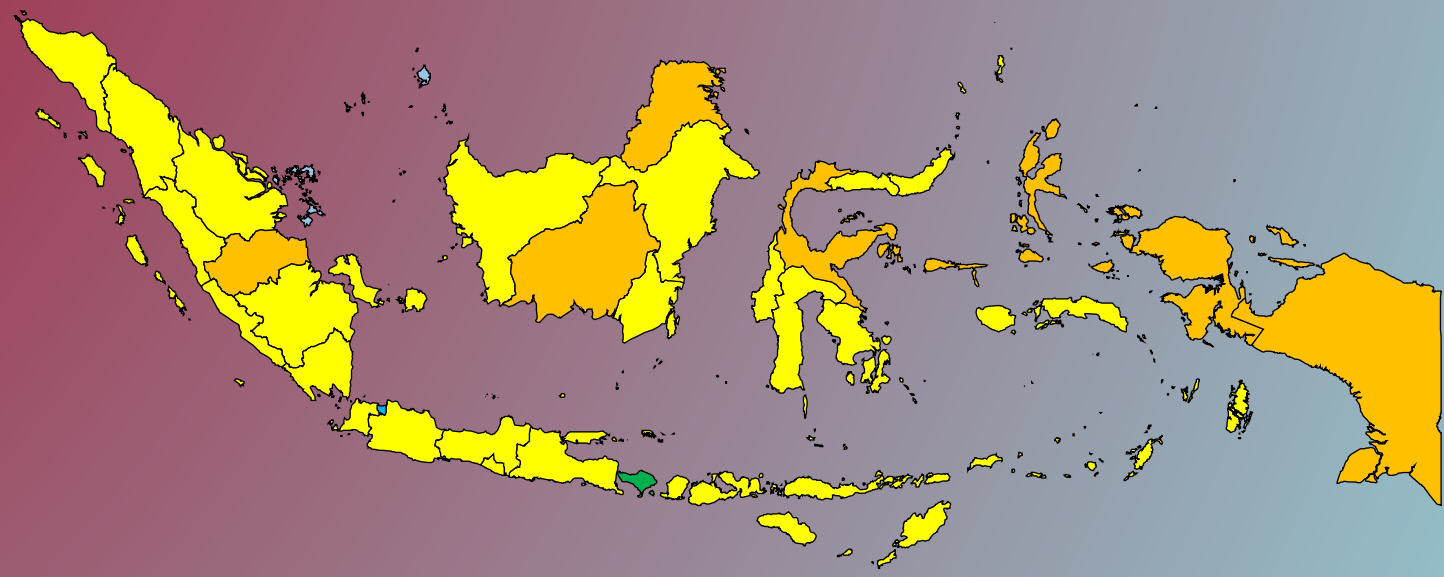

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

OUTLINE

1) Arah Kebijakan Penerapan SPBE
2) Urgensi Evaluasi SPBE
3) Progres Penerapan SPBE
4) Evaluasi SPBE 2024
5) Peran Dalam Evaluasi SPBE
6) Keterkaitan Evaluasi SPBE dan Evaluasi RB

ARAH KEBIJAKAN PENERAPAN SPBE

panrb

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

Arahan Presiden **Joko Widodo** Tentang **Reformasi Birokrasi**

1.

Birokrasi yang **Berdampak**

2.

Reformasi Birokrasi **Bukan Tumpukan Kertas**

3.

Birokrasi **Lincah dan Cepat**

(Ditopang Pemerintah Digital **Berbasis Data**)

ARAHAN PRESIDEN RI - 27 MEI 2024
SPBE SUMMIT 2024 DAN PELUNCURAN GOVTECH INDONESIA

01 Kehadiran birokrasi harusnya melayani, bukan mempersulit dan memperlambat

02 Mulai tahun ini, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus berhenti membuat aplikasi baru yang sifatnya tidak efektif dan efisien.

03 Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data, untuk menciptakan ekosistem layanan.

04 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memperkuat Digital Public Infrastructure sebagai jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik.

05 Konsolidasi layanan publik terintegrasi ke dalam satu portal layanan

06 Penyiapan ASN yang bertalenta digital, serta melakukan perbaikan terus menerus baik dari sistem maupun layanan yang ada untuk kepentingan masyarakat.

URGENSI EVALUASI SPBE

TRANSFORMASI TATA KELOLA

Masalah Tata Kelola Pemerintahan

- Ego sektoral/tidak ada koordinasi antar K/L/D
- Tumpang tindih kewenangan
- Duplikasi program/kegiatan
- Proses pengambilan keputusan yang panjang/tidak berdasar pada data
- Prosedur pelayanan yang berbelit
- Tata kelola tidak transparan

Pengembangan *E-Government* untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui

INPRES NO. 3/2003

ISU DALAM PENERAPAN E-GOV

- Pembangunan TIK Sektoral
- Tata Kelola TIK Tidak Terpadu
- Tingkat Kematangan SPBE Rendah

KEBUTUHAN

KETERPADUAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI SPBE

PERPRES NO. 95/2018

SPBE

PENATAAN KELEMBAGAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

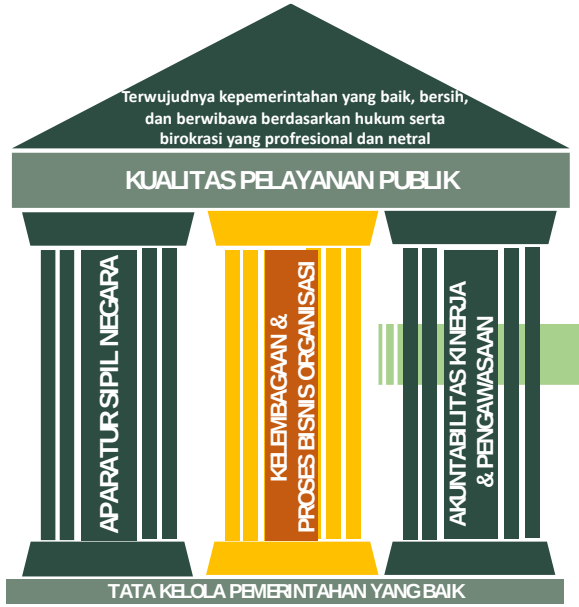

Sumber: Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Penerapan SPBE yang Terintegrasi

Perpres No. 95/2018

PERPRES 95/2018 TENTANG SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah **penyelenggaraan pemerintahan** yang memanfaatkan **teknologi informasi dan komunikasi** untuk memberikan **layanan** kepada pengguna SPBE.

TUJUAN SPBE

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel

Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya

Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE

SPBE Sebagai Pendukung **Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah** dan pelaksanaan **Tata Kelola Pemerintahan** berbasis elektronik

RUANG LINGKUP PERPRES SPBE

TATA KELOLA SPBE

Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu, yang terdiri dari:

a. Rencana Induk dan Arsitektur SPBE
b. Rencana Anggaran
c. Proses Bisnis
d. Data dan Informasi
e. Infrastruktur SPBE
f. Aplikasi SPBE
g. Keamanan SPBE
h. Layanan SPBE

MANAJEMEN SPBE

Melaksanakan pengelolaan unsur-unsur SPBE secara efisien, efektif, dan berkesinambungan, yang terdiri dari:

a. Manajemen Risiko
b. Manajemen Keamanan Informasi
c. Manajemen Data
d. Manajemen Aset TIK
e. Manajemen Layanan
f. Manajemen Pengetahuan
g. Manajemen Perubahan
h. Manajemen SDM, dan
i. Audit TIK

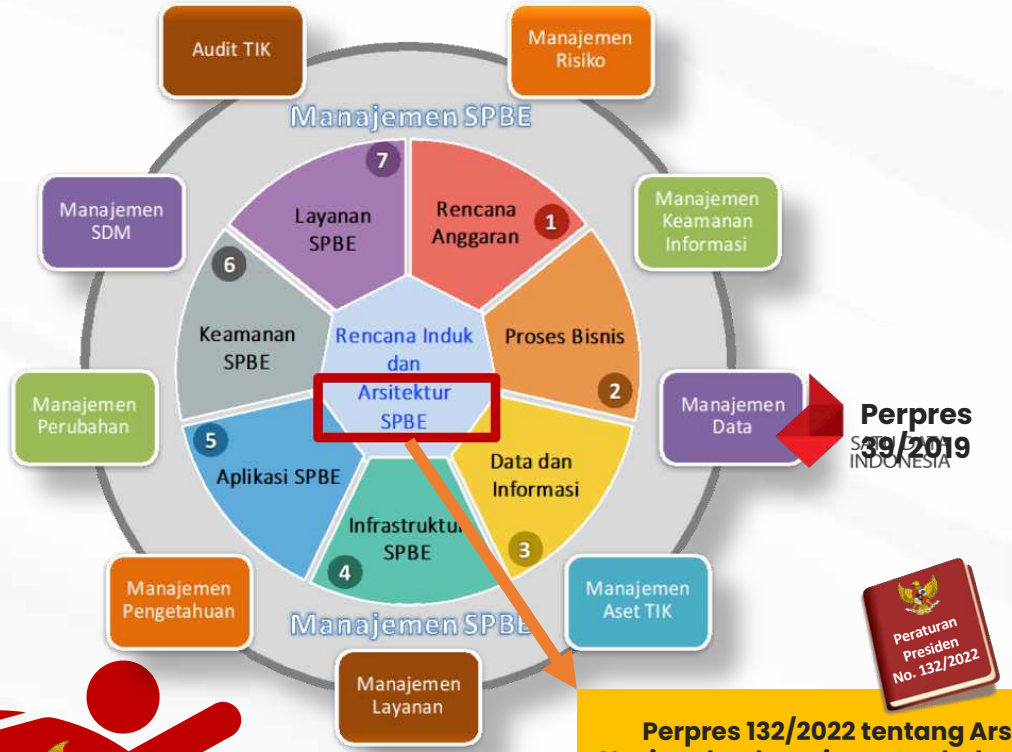

Perpres 39/2019

Perpres 132/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, sebagai payung hukum keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis SPBE

PENYELENGGARA SPBE

- Tim Koordinasi SPBE Nasional
- Pelaksana SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Amanat Perpres 95/2018 Pasal 70

Untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

PROGRES PENERAPAN SPBE

GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN EVALUASI SPBE TAHUN 2023

panrb
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DASAR HUKUM

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

1. **Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat memberikan saran peningkatan**
2. **Menjamin kualitas pernerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tujuan SPBE**
3. **Penerapan SPBE sebagai landasan menuju Transformasi Digital Pemerintahan melalui program prioritas Kementerian PANRB**

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Total Responden

645 IPPD*

- Kementerian (34)
- LPNK (23)
- Lembaga lainnya (15)
- LNS (27)
- Pemerintah Provinsi (38)
- Pemerintah Kabupaten (415)
- Pemerintah Kota (93)

*) Keputusan Menteri PANRB Nomor 461 Tahun 2023

Asesor Eksternal

Kerja sama Tim Koordinasi SPBE Nasional dan 30 Perguruan Tinggi

(130 Asesor Eksternal)

- Ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 462 Tahun 2023

Output dan Outcome

LHE IPPD dan Indeks SPBE "Baik"

panrb KOMINFO BRIN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

UI UGM ITS PENS TEL-U UG IPB ITB UKPETRA UAD BINUS UEU UKSW UBAYA UNTAR UNUD UII UINJKT UNDIP UNBRAW USU UNPAD UTM UNAIR UNHAS UNESA UNS POLTEK PADANG CALTEX ITK

CAPAIAN INDEKS SPBE NASIONAL TAHUN 2023

panrb
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Sinergi untuk Indonesia Maju

Progres Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2018 - 2023

Deskripsi	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Peningkatan (2021-2023)	Hasil Tahun 2023
Indeks SPBE Nasional	**1,98**	**2,18**	**2,26**	**2,24**	**2,34**	**0,28**	**2,79**
Indeks Domain Kebijakan	1,75	1,95	2,07	2,21	2,39	0,37	2,94
Indeks Domain Tata Kelola	1,74	1,86	1,95	1,89	1,85	0,20	2,29
Indeks Domain Manajemen	-	-	-	1,23	1,32	0,22	1,66
Indeks Domain Layanan	2,17	2,40	2,48	2,81	2,96	0,33	3,47
`Jumlah IPPD Kategori "Baik"	82	196	256	159	185	114	388
Jumlah Responden (IPPD)	582	603	603	517	554	52	621

*Catatan: Pada tahun 2018 – 2020 instrumen penilaian yang digunakan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018, sedangkan mulai tahun 2021 instrument penilaian yang digunakan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020.

INDEKS SPBE NASIONAL

Metodologi yang digunakan adalah pola ***inkremental***, sehingga pergerakan Indeks SPBE Nasional dilakukan secara gradual dengan mengakumulasi penambahan IPPD dan perubahan indeks IPPD terbaru, dimana pada tahun 2023 proyeksi yang ditargetkan sebesar 2,60.

Grafik Capaian Indeks SPBE Nasional Tahun 2018 - 2023

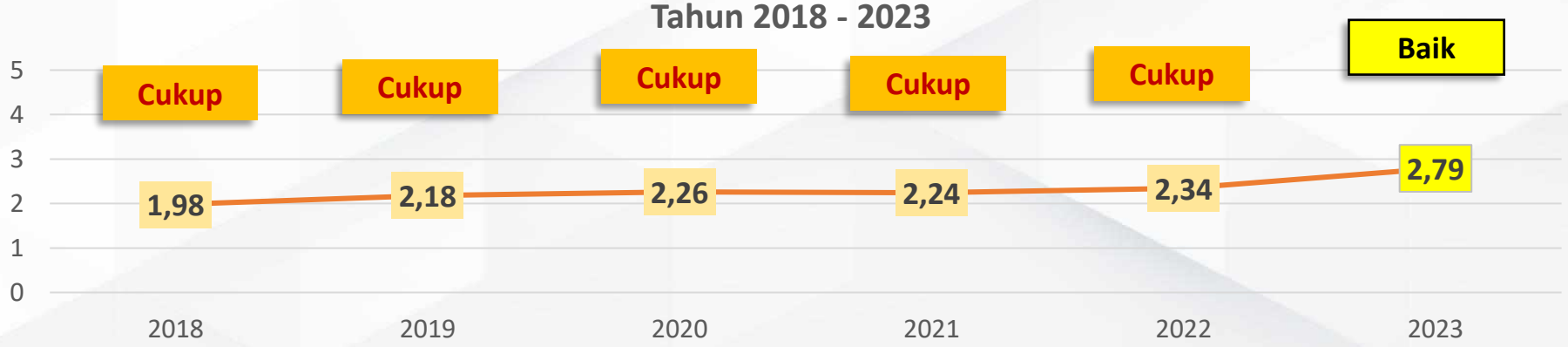

Range Indeks dan Predikat Penerapan SPBE

Rentang Indeks	Predikat SPBE
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 - <4,2	Sangat Baik
2,6 - <3,5	Baik
1,8 - <2,6	Cukup
<1,8	Kurang

PEROLEHAN PREDIKAT NASIONAL SERTA PERSENTASE PREDIKAT "BAIK" KEATAS

panrb
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK SPBE

Perolehan Predikat Nasional Tahun 2023

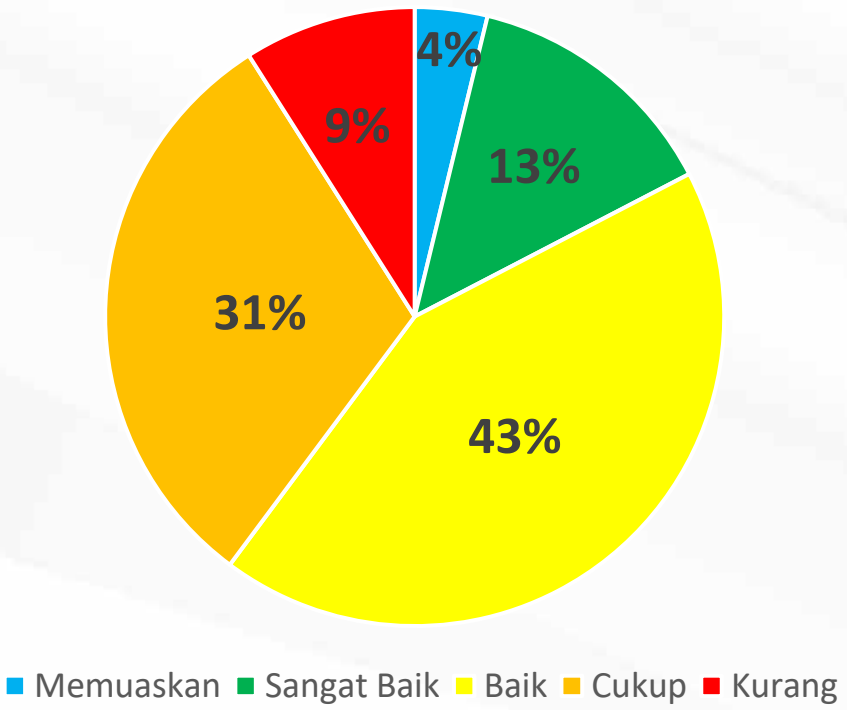

Persentase IPPD dengan Predikat "Baik" ke Atas Tahun 2021 - 2023

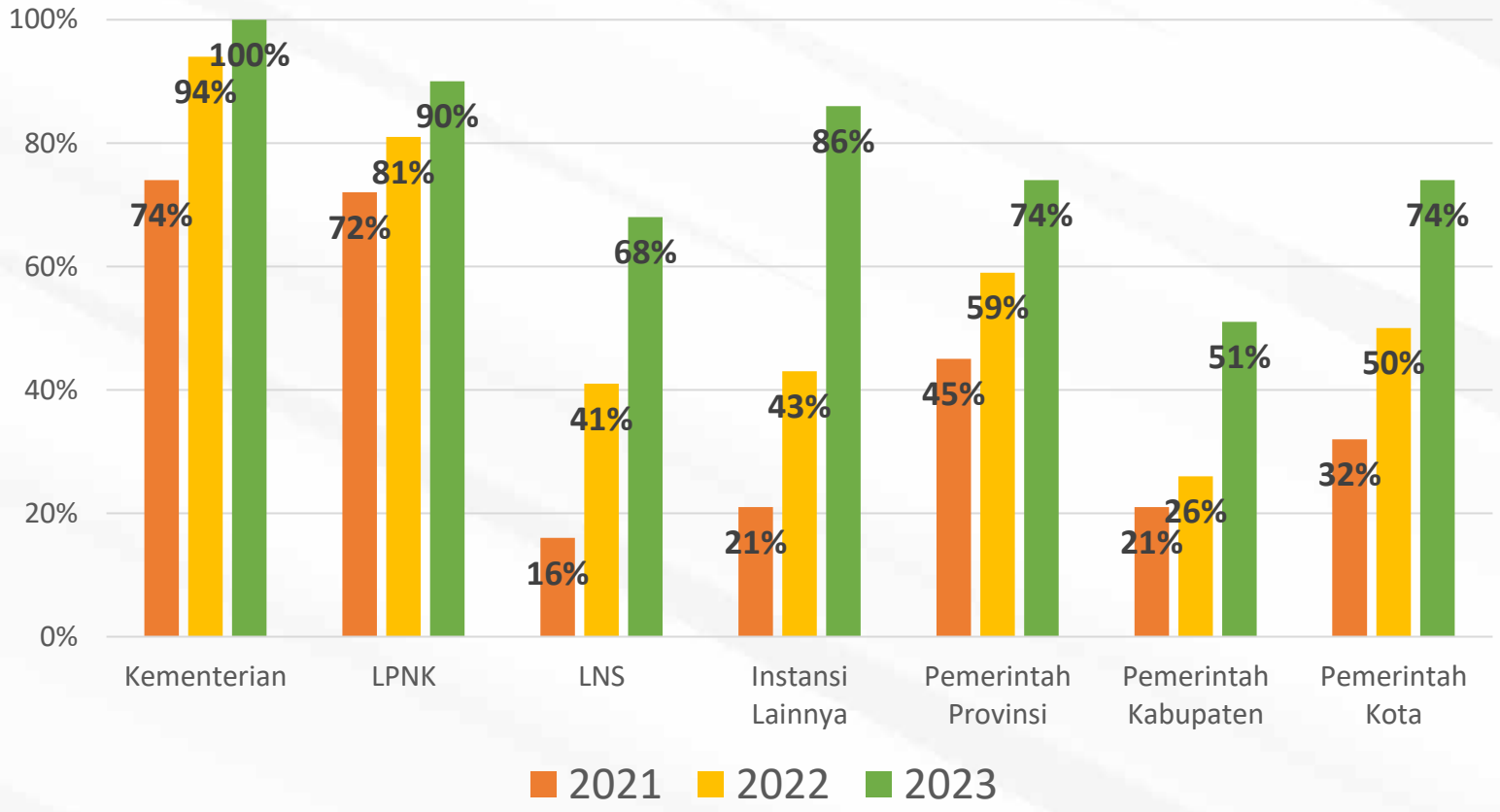

Nb. Pemantauan dan Evaluasi SPBE menghasilkan rerata indeks pada 633 IPPD, dimana tingkat partisipasi pada tahun 2023 tercatat sebanyak 621 IPPD melaksanakan Evaluasi SPBE, sedangkan 12 IPPD dihasilkan dari penilaian pada tahun-tahun sebelumnya.

EVALUASI SPBE TAHUN 2024

TARGET CAPAIAN
PENERAPAN SPBE NASIONAL
TAHUN 2024

2,85

INDEKS SPBE

638 IPPD

TARGET RESPONDEN

100%

PERSENTASE INSTANSI PUSAT "BAIK" KE ATAS

80%

PERSENTASE PROVINSI "BAIK" KE ATAS

60%

PERSENTASE KAB/KOTA "BAIK" KE ATAS

350 IPPD DENGAN PREDIKAT SPBE "BAIK" KE ATAS

panrb
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

GAMBARAN UMUM TINDAK LANJUT PELAKSANAAN EVALUASI SPBE TAHUN 2024

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Sinergi untuk Indonesia Maju

DASAR HUKUM

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- **Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 sebagai Perubahan atas Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

URGENSI

1. **Sesuai Perpres 18/2020 telah ditetapkan persentase target capaian penerapan indeks SPBE untuk K/L, Provinsi, Kab/Kota tahun 2020, 2022 dan 2024**
2. **Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE dan menjamin kualitas pernerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tujuan SPBE**
3. **Penerapan SPBE sebagai landasan menuju Transformasi Digital Pemerintahan melalui program prioritas Kementerian PANRB**

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Total Responden

638 IPPD*

- Kementerian (34)
- LPNK (23)
- Lembaga lainnya (15)
- LNS (25)
- Pemerintah Provinsi (38)
- Pemerintah Kabupaten (415)
- Pemerintah Kota (93)

Asesor Eksternal

Kerja sama Tim Koordinasi SPBE Nasional dan 36 Perguruan Tinggi dan 1 Yayasan

(Asesor Eksternal)

- Ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB

Output dan Outcome

LHE IPPD dan Indeks SPBE "Baik"

*) Keputusan Menteri PANRB Nomor 229 Tahun 2024

panrb KOMINFO BRIN

UI UGM ITS PENS TEL-U UG IPB ITB UKPETRA UAD BINUS UEU UKSW UBAYA UNTAR UNUD UII UINJKT UNDIP UNBRAW USU UNPAD UTM UNAIR UNHAS UNESA UNS POLTEK PADANG CALTEX ITK

METODOLOGI EVALUASI SPBE

METODE EVALUASI PERMENPANRB 59/2020

Mengukur tingkat kematangan (skala 1 - 5) pada 47 indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan SPBE

Kebijakan	Kebijakan Tata Kelola SPBE	•Indikator kebijakan internal yang mendukung penerapan tim koordinasi SPBE, perencanaan, strategi, manajemen, dan Audit TIK SPBE.
Tata Kelola	Perencanaan Strategis SPBE	•Indikator terkait arsitektur, peta rencana, anggaran, dan proses bisnis SPBE.
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	•Indikator kematangan pembangunan jaringan intra pemerintah, pusat data, dan sistem penghubung layanan SPBE.
	Penyelenggara SPBE	•Indikator pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE.
Manajemen	Penerapan Manajemen SPBE	•Indikator manajamen risiko, keamanan informasi, data, aset, SDM, pengetahuan, perubahan, dan Layanan SPBE.
	Audit TIK	•Indikator audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE
Layanan	Layanan Administrasi Pemerintahan	•Indikator layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan BMN, pengawasan, akuntabilitas, kinerja.
	Layanan Publik	•Indikator layanan pengaduan publik, data terbuka, JDIH, dan layanan publik unggulan lain.

Tingkat Kematangan Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen

1 Rintisan	2 Terkelola	3 Terdefinisi
4 Terpadu dan Terukur	5 Optimum	

Tingkat Kematangan Layanan

1 Informasi	2 Interaksi	3 Transaksi
4 Kolaborasi	5 Optimum	

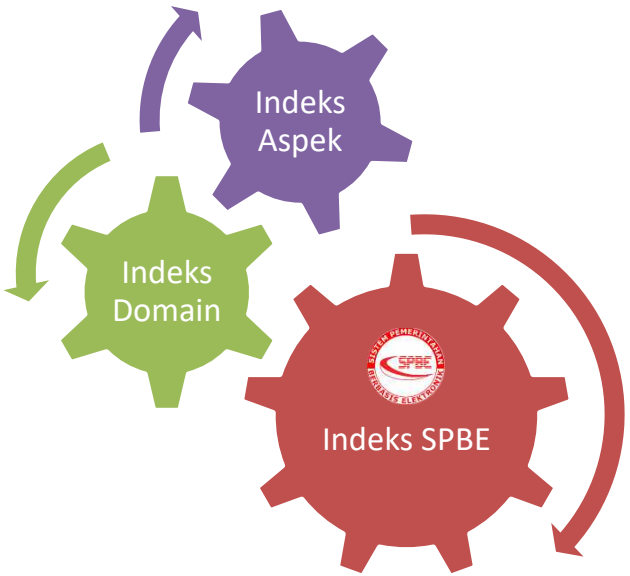

NO	NAMA DOMAIN	JUMLAH INDIKATOR	BOBOT (100%)
1	KEBIJAKAN INTERNAL SPBE	10	13% (@1,3%)
2	TATA KELOLA SPBE	10	25% (@2,5%)
3	MANAJEMEN SPBE	11	16,5% (@1,5%)
4	LAYANAN SPBE	16	45,5% (@2,75%/@3%)

Nilai Indeks SPBE:

- *merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.*
- *nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan.*

TAHAPAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

PERMENPANRB 59/2020

PEMANTAUAN

01 TAHAP PERSIAPAN

- Penyusunan Perencanaan;
- Pembentukan Tim Asesor;
- Sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.

02 TAHAP PELAKSANAAN

- Penilaian mandiri;
- Penilaian dokumen;

03 TAHAP PELAPORAN

- Indeks SPBE;
- Indeks Domain;
- Indeks Aspek; dan,
- Nilai Indikator.

EVALUASI

01 TAHAP PERSIAPAN

- Penyusunan Perencanaan;
- Pembentukan Tim Asesor;
- Sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.

02 TAHAP PELAKSANAAN

- Penilaian mandiri;
- Penilaian dokumen;
- Penilaian interviu;
- Penilaian visitasi (jika diperlukan).

03 TAHAP PELAPORAN

- Indeks SPBE;
- Indeks Domain;
- Indeks Aspek;
- Nilai Indikator; dan,
- Rekomendasi perbaikan.

PERAN DALAM PELAKSANAAN EVALUASI SPBE

STRUKTUR TIM ASESOR INTERNAL

Tim Asesor Internal ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah dimana struktur Tim Asesor Internal terdiri atas:

Koordinator SPBE

Sekretaris Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
- Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri PANRB.

Penanggung Jawab

1 (satu) orang dari unsur Pejabat

- Mengoordinasikan dan memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan aktivitas Sosialisasi, Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
- Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung; dan
- Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.

Pelaksana Entri Data

1 (satu) orang dari unsur Pejabat/Pegawai

- Mengumpulkan, mendokumentasikan dan memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
- melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

Tim Asesor Internal

Anggota lain dari unit kerja/perangkat daerah yang terkait

- Melakukan/mengikuti bimbingan teknis substansi Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- Melakukan penyiapan bukti pendukung indikator pertanyaan;
- Melaksanakan Penilaian Mandiri, Interviu dan Visitasi (jika dilakukan); dan
- Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.

CONTOH KEANGGOTAAN TIM ASESOR INTERNAL

Koordinator SPBE K/L/Pemda membentuk Tim Asesor Internal.

TIM ASESOR INTERNAL

Anggota Tim Asesor Internal terdiri dari Pejabat/pegawai yang berasal dari unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait dengan lain:

- Organisasi dan ketatalaksanaan;
- Pengelolaan data dan informasi;
- Teknologi informasi dan komunikasi;
- Keamanan Informasi;
- Hukum;
- Perencanaan;
- Penganggaran;
- Akuntabilitas kinerja;
- Keuangan;
- Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Pengelolaan barang milik negara/daerah;
- Sumber daya manusia;
- Kearsipan;
- Pengawasan; dan,
- Pelayanan publik.

TIPS KOLABORASI DALAM PELAKSANAAN EVALUASI SPBE

PIC Anggota Tim Assesor

Perkuat **TIM ASESOR** dengan menentukan **PIC** pada masing-masing Indikator yang terkait dengan tugas/fungsinya

OPERATOR Layanan/Aplikasi

Siapkan **PIC** layanan/ **APLIKASI** untuk mendemokan **FITUR FUNGSI TEKNIS** Layanan (*username* dan *password*) sehingga dapat memberikan pemahaman/ uraian kemampuan teknis

DOKUMENTASI/ SCREENSHOT/ VIDEO

Siapkan data dukung yang komprehensif seperti **DOKUMENTASI/VIDEO** untuk digunakan sebagai data pendukung

PENJELASAN DAN DATA DUKUNG YANG AKURAT

Perkuat **PENJELASAN** dan **DATA DUKUNG** yang lengkap sesuai kaidah Pedoman Menteri PANRB untuk setiap indikator sehingga akan memberikan penjelasan yang akurat

TIPS: PERKUAT KOLABORASI *TIM (ANTAR UNIT KERJA)*

ALUR PROSES PENILAIAN MANDIRI MELALUI APLIKASI DALAM EVALUASI SPBE

Tim Evaluasi	Tim Asesor Internal (K/L/D)		Asesor Eksternal dan Kementerian PANRB	
Proses	**Tahap 1** Pengisian dan Penilaian	**Tahap 2** Persetujuan	**Tahap 3** Peniliaian Eksternal	**Tahap 4** Reviu dan Pengelolaan
Pengguna	Pelaksana Entri Data	Penanggung Jawab	Asesor Eksternal	Administrator
Tugas	• Mengumpulkan dan mengelola data evaluasi mandiri; • Mengisi/mengubah isian, penjelasan, dan data dukung sesuai dengan kesepakatan Tim Evaluator Internal K/L/D; • Menyampaikan hasil evaluasi kepada Penanggung Jawab.	• Memeriksa isian; • Mengembalikan hasil isian kepada Pelaksana Entri Data • (jika diperlukan); • Menyampaikan hasil evaluasi mandiri kepada Kementerian PANRB atas persetujuan Pimpinan untuk dilakukan asesmen. • Melakukan perbaikan hasil penilaian	• Melaksanakan asesmen terhadap hasil evaluasi mandiri K/L/D (Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, Penilaian Visitasi); • Memperbaiki hasil reviu; • Menyusun laporan hasil evaluasi.	• Melakukan reviu terhadap penjelasan yang diberikan evaluator; • Mengelola seluruh tahapan pelaksanaan evaluasi; • Melakukan pengolahan data.

KETERKAITAN EVALUASI SPBE DENGAN EVALUASI RB

KOMPONEN UTAMA LEMBAR KERJA EVALUASI RB

RB General

KOMPONEN	BOBOT
Staregi Pelaksanaan RB General	10
Capaian Pelaksanaan Kebijakan	40
Capaian Sasaran Strategis	50
TOTAL	100

RB Tematik

Kementerian/Lembaga

KOMPONEN	BOBOT
Capaian RB Tematik	10
Total	10

Pemerintah Daerah

KOMPONEN	BOBOT
Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5
Capaian Indikator Dampak	15
Total	20

Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE (Bobot 2)

Indeks SPBE (Bobot 9)

EVALUASI PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE

EVALUASI SPBE – INDEKS SPBE (PERMENPAN 59/2020)

Diukur dengan menggunakan metode tingkat kematangan (*e-government maturity model*). Untuk Tingkat kematangan penerapan arsitektur diukur berdasarkan **metode tingkat kematangan kapabilitas proses**.

Nilai Tingkat kematangan	Kriteria
1	Dokumen bukti dukung hanya berupa konsep/draft (belum ditandatangani secara resmi)
2	• Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang • Belum mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)
3	• Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang • Sudah mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)
4	• Melakukan reviu dan evaluasi • Telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional ✓ Menggunakan referensi arsitektur SPBE nasional ✓ Mendukung inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional
5	Dilakukan pemutakhiran (proses revitalisasi as-is dan to-be arsitektur secara periodik)

EVALUASI RB – INDEKS RB (PERMENPAN 9/2023)

Diukur pada tahap evaluasi eksternal yang dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional untuk mendapatkan gambaran objektif perkembangan hasil dan **dampak reformasi birokrasi.**

Nilai Tingkat kematangan	Kriteria
0	Belum memiliki arsitektur
1	Sudah memiliki arsitektur as-is
2	Memenuhi kriteria (1) dan sudah memiliki arsitektur to-be
3	Memenuhi kriteria (2) dan telah melakukan gap analysis serta menyusun peta rencana SPBE berdasarkan arsitektur SPBE (as-is, to-be, dan gap analysis-nya)
4	Memenuhi kriteria (3) dan telah mengimplementasikan arsitektur SPBE dalam proses perencanaan dan penganggaran SPBE (proses evaluasi belanja TIK)
5	Memenuhi kriteria (4) dan telah melakukan reviu/evaluasi arsitektur SPBE secara periodik sebagai sebuah siklus perbaikan berkelanjutan

RENCANA TIMELINE
EVALUASI SPBE TAHUN 2024

1 — 16 – 18 Juli

Sosialisasi pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2024 kepada seluruh IPPD yang diselenggarakan secara online

2 — 17 Jul – 18 Agt

Penilaian Mandiri oleh seluruh IPPD melalui aplikasi tauval.spbe.go.id

3 — 19 Agt - 20 Sept

Penilaian Dokumen Evaluator Eksternal terhadap hasil Penilaian Mandiri IPPD

4 — 25 Sept – 15 Okt

Interviu antara Asesor Eksternal dan Tim Asesor Internal IPPD

5 — November

Visitasi Asesor Eksternal ke lokus penilaian (apabila diperlukan)

6 — November

Konsolidasi dan harmonisasi hasil penilaian

7 — Desember

Penyusunan laporan analisis, rekomendasi dan hasil evaluasi

TAHAPAN PENTING !

ASESOR INTERNAL IPPD

- **Sosialisasi** untuk peningkatan pemahaman antar personil Asesor Internal, sehingga dapat memastikan bahwa substansi masing-masing indikator penilaian dapat dipahami Bersama
- Agar dapat melibatkan seluruh unit kerja terkait dalam **Penilaian Mandiri**, sehingga dapat mengoptimalkan data dukung yang akan disampaikan
- Optimalkan proses **Interviu** untuk memastikan relevansi dan validitas data dukung. Masih ada kesempatan untuk mengupload data tambahan yang dibutuhkan oleh Asesor Eksternal

**) Jadwal kegiatan telah disampaikan melalui surat Menteri PANRB kepada seluruh IPPD, Apabila ada perubahan jadwal, maka akan diinformasikan melalui group sosial media (WAG)*

panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TERIMA KASIH

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Sinergi untuk Indonesia Maju